

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma III
Jurusan Akuntansi



Oleh :

NOVI ANGGRAINA

NIM : 2013411061

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**

PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Novi Anggraina
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 08 November 1995
NIM : 2013411061
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
pada Pemerintah Kota Surabaya

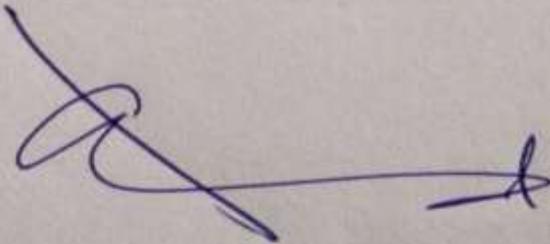
Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma

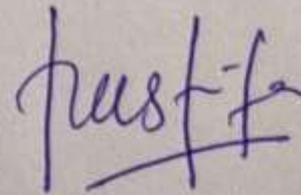
Tanggal 18 April 2016

Dosen Pembimbing

Tanggal 18 April 2016



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM



Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., M.S.A

I. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). Anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Selain anggaran, instrumen lain untuk melaksanakan kebijakan anatara lain sumber daya manusia (SDM), peralatan, metologi pelaksanaan kebijakan dan lain-lain.

Namun instrumen di luar anggaran tersebut akan dapat berjalan jikalau ada dukungan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja mendasarkan prosesnya pada perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas pengguna anggaran (*budget entity*). Pemerintahan kota Surabaya dan SKPD kota Surabaya termasuk daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan terdesentralisasi. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah harus dinilai efektivitas dan efisiensi kerjanya dalam mengelola keuangan dan mencapai target-target yang dicapai dalam memaksimalkan pendapatan.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja mendasarkan prosesnya pada perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas pengguna anggaran (*budget entity*). Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja organisasi ataupun unit organisasi tidak hanya mewajibkan menyusun fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga merencanakan kegiatan yang ingin dicapai, dalam bentuk keluaran atau terutama hasil program atau kegiatan yang akan dilaksanakan

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA”**.

II. Tujuan Penelitian dan Manfaat

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini antara lain: Mengetahui penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Kota Surabaya.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi untuk mengetahui proses pemerintah dalam menyusun Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Kota Surabaya.
2. Umum, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan tentang Anggaran Berbasis Kinerja yang berkaitan dengan Penerapan (SAP) Sistem Akuntansi Pemerintahan
3. Mahasiswa, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan terutama lingkungan Perguruan Tinggi.

III. Metode Pengamatan

Pengumpulan data dan informasi menggunakan metode penelitian data sebagai berikut :

1. Metode wawancara (Interview).

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak instansi pemerintah terkait. Wawancara dilaksanakan dengan pegawai di bagian akuntansi pada bidang penganggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini maka penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari catatan dan laporan yang disusun perusahaan, serta buku pendukung lainnya.

IV. Subyek Pengamatan

Dinas Pendapatan Kota Surabaya (DISPENKOT) lebih dikenal dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto 25-27 lantai I dan II ini merupakan gabungan antara dua SKPD yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

V. Ringkasan Pembahasan

Dalam menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran. Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya sudah menerapkan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

Prinsip-prinsip utama dan sifat-sifat yang dikandung dalam Anggaran Berbasis Kinerja, meliputi:

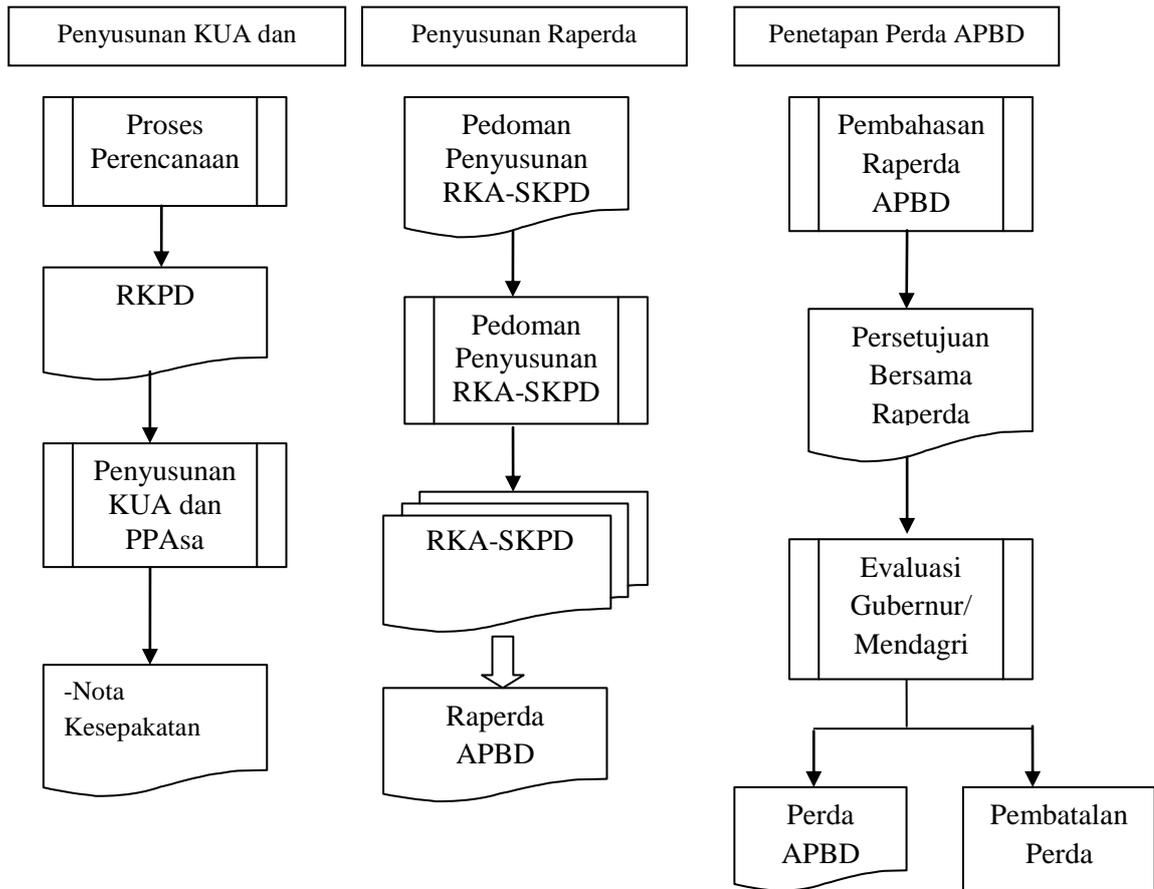
1. Penekanan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output yang diukur dengan beberapa indikator.

Tiga elemen *value for money* adalah:

- a) Ekonomis, yaitu memperoleh input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga terendah.
- b) Efisien, yaitu pemanfaatan input minimal untuk mencapai hasil yang maksimal atau dalam praktik berarti ‘melaksanakan sesuatu dengan benar’
- c) Efektif, yaitu mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan secara maksimal atau dalam praktik berarti ‘melakukan hal yang benar’.

Proses Penyusunan Kegiatan Di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (DPPK) mengikuti proses perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman ini digunakan oleh seluruh di Indonesia dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menggunakan acuan pedoman tersebut.

Penyusunan kegiatan berawal dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 tahun sesuai masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.



Gambar 1

Proses Penyusunan APBD

Sumber:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Adapun pihak-pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan Anggaran adalah :

- a. Raperda (Rapat Perwakilan Daerah) menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam jangka waktu satu tahun dan tidak boleh bertentangan dengan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan kebijakan pusat dan provinsi.
- b. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menetapkan pagu untuk SKPD, yaitu pagu untuk anggaran belanja langsung.
- c. RKA (Rencana Kerja Anggaran) pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
- d. Dewan Anggaran antar TAPD bersama dengan SKPD
- e. Dewan Legislatif melakukan musyawarah untuk dilakukan pembahasan
- f. Melaporkan di Bamus (Badan Musyawarah) atas hasil musyawarah yang telah dilakukan.

- g. Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama Dewan Anggaran, Baperda, Bina Program, DPPK perlengkapan aset, Badan Kepegawaian dan diklat, hukum dan inspektorat.

VI. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam menyajikan penerapan anggaran sudah mengacu dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kendala dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tidak mengalami kendala atau hambatan yang berarti.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian, penulis mengalami beberapa pengalaman yang menarik selama proses penelitian berlangsung serta dalam penyelesaian tugas akhir ini. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya
Tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja yang baik dan menyusun anggaran berbasis kinerja lebih dijadikan motivasi bagi seluruh pegawai dinas agar selalu meningkatkan kinerjanya secara terus menerus untuk memberikan kepuasan pelayanan serta untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. STIE Perbanas Surabaya
Memberikan informasi yang sesuai dan tepat waktu serta pelayanan dengan baik untuk seluruh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya, khususnya mahasiswa yang sedang mengurus tugas akhir dan skripsi.
3. Penulis Selanjutnya
Meningkatkan kualitas penelitian sehingga memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat digunakan bagi para pembaca, serta membantu memperoleh hasil data yang lebih memuaskan dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini dan Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya website (<http://www.dppksby.com>, diakses 07 Oktober 2015)